



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang

Nomor Registrasi: 33.25-14042-41762-2021

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD)

1.2. Dibuat Oleh

null (null)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

kearsipan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dalam belakangan ini, Arsip sangat penting untuk penunjang dokumen keabsahan bahkan pelengkap suatu bukti. seringkali, arsip yang sudah di print out hilang atau bahkan kesingsal. apalagi bagi dunia perkantoran, seringkali menerima bnayak sekali arsip untuk kelengkapan data-data pendukung atau bahkan untuk Arsip Khusus di suatu Instansi. Dengan tercecernya arsip yang dalam bentuk hardcopy, menimbulkan ke sulitan untuk membuka kembali arsip yang dipunya dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi jika arsip itu penting, seringkali kita kesulitan

untuk membuka Laci demi laci untk mendapatkan 1 lembar Arsip yang dibutuhkan, atau kita harus membuka buku yang tebal untuk mendapatkan arsip tersebut.

Sehingga Arsip merupakan sesuatu hal yang sangat vital dan penting terutama bagi sebuah organisasi yang informasinya terus berjalan dengan begitu cepat. untuk itu, untuk mnegatasi beberapa permasalahan di atas dibuatlah Inovasi baru berbasis digital mengenai Jaringan Kearsipan Informasi Daerah. JDIH ini snagat membantu instansi manapun untuk mencari dan membuka kembali arsip yang sudah di terbitkan. apalagi dalam bentuk Surat Keputusan yang mana sangat penting bagi beberapa instansi. dengan adanya JDIH ini membantu perangkat daerah untuk mengarsipkan dan menyimpan arsip yang sudah di terbitkan dalam bentuk web. dokumen dalam bentuk ahrdcopy diubah menjadi bentuk softcopy dan di uplaod di web JDIH dengan pemberian keterangan yang sangat ringkas dan memudahkan perangkat daerah untuk membuka dan menyimpan bahkan mengunduh arsip dari 5 tahun kebelakang. dengan adanya inovasi baru ini mengenai ke arsipan sangat membantu dan memberikan kesan efisein dan praktis sehingga tidak pelru repot-repot membuka dokumen berlembar-lembar untuk mendapkan arsip yang dibutuhkan. Dengan masuk web JDIH dan mengetikkan kata kunci di kolom search maka arsip yang dibutuhkan akan langsung muncul dalam beberapa detik. dan perangkat daerah mampu menggunakan dan mengunduh bahkan menyimpan arsip tersebut agar lebih praktis karena perkembangan Industri sekarang ini sudah masuk ke 4.0 dimana kita harus terbiasa dengan teknologi dan perkembangan zaman bahkan dalam bentuk digital, kita dituntut untuk bisa menguasai dan mengimbangi akan perkembangan yang ada saat ini. sehingga dengan munculnya JDIH ini merupakan cerminan dari perkembangan Industri 4.0 dan mengefisienkan waktu dan kegiatan agar tidak semuanya selalu manual namun berbasis digital juga bsia.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Kemudahan akses layanan informasi arsip statis dan dinamis

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

memberikan kemudahan akses informasi arsip statis pada masyarakat dan akses arsip dinamis bagi perangkat daerah melalui web

1.11. Hasil Inovasi

aringan Informasi Kearsipan Daerah : <http://arsip.batangkab.go.id/>

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

02-01-2020

1.13. Waktu Implementasi

11-08-2020

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis -

1.16. Kematangan

6.00

2. INDIKATOR INOVASI

| NoIndikator SPD | Informasi | Bukti Dukung |
|---|--|----------------|
| 1. Regulasi Inovasi Daerah | SK Kepala Perangkat Daerah | Tidak Tersedia |
| 2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah | Lebih dari 30 | Tidak Tersedia |
| 3. Dukungan Anggaran | Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah | Tidak Tersedia |
| 4. Penggunaan IT | Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring | Tidak Tersedia |
| 5. Bimtek Inovasi | - | Tidak Tersedia |
| 6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir | Tidak Tersedia |
| 7. Jejaring Inovasi | Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih | Tidak Tersedia |
| 8. Replikasi | - | Tidak Tersedia |
| 9. Pedoman Teknis | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online | Tidak Tersedia |
| 10. Pelaksana Inovasi Daerah | Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK | Tidak Tersedia |

| | | |
|--|--|---|
| | Kepala Perangkat Daerah | |
| 11. Kemudahan Informasi Layanan | Layanan melalui aplikasi online | Tidak Tersedia |
| 12. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 31% s/d 60% | Tidak Tersedia |
| 13. Keterlibatan aktor inovasi | - | Tidak Tersedia |
| 14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari | Tidak Tersedia |
| 15. Online Sistem | Ada dukungan melalui web aplikasi | Tidak Tersedia |
| 16. Kecepatan Inovasi | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan | Tidak Tersedia |
| 17. Kemanfaatan Inovasi | Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas | Tidak Tersedia |
| 18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian | Tidak Tersedia |
| 19. Sosialisasi Inovasi Daerah | Media Berita | Fitur Arsip Statis, Halaman Muka Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JKD) |
| 20. Kualitas Inovasi Daerah | Memenuhi 5 unsur substansi | Tidak Tersedia |